

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat dan Cina adalah dua negara besar yang memiliki sistem politik pemerintahan yang sangat berbeda. Dari perbedaan ideologi yang mana Amerika Serikat berideologi demokrasi sementara Cina berideologi komunis dan seiring dengan perkembangan zaman Cina mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan bahkan dalam bidang ekonomi menyaingi negara-negara maju lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa.

Pada tahun 2006, PDB Cina hanyalah bernilai 2,3 triliun dollar AS, sekitar separuh dari PDB Jepang. Kini dalam waktu yang sangat singkat, ternyata Jepang dapat disalip oleh Cina. Ini adalah bukti nyata kemajuan Cina. Pemerintah Tokyo mengatakan, perekonomian mereka bernilai 1,28triliun dollar AS pada kuartal kedua 2010, dibawah Cina yang bernilai 1,33 triliun dollar AS. Perekomian Cina melaju pesat, setelah berhasil melampaui Jepang-serta beberapa tahun lalu melampaui Jerman, Perancis, dan Inggris-Cina akan melampaui AS dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia sebelum tahun 2030. Sementara itu produk domestik bruto AS mencapai 14 triliun dollar AS pada tahun 2009.¹

Munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia adalah kenyataan mutakhir yang tidak bisa dipungkiri oleh negara manapun. Sejak tahun 1978, Cina

¹ Kompas, 18 Agustus 2010, *China resmi salip Jepang*, Kompas Media Nusantara: Jakarta

menjadi sebuah negara dengan dua sistem yaitu; secara politik tetap komunis dan secara ekonomi menjadi kapitalis atau sistem sosialisme pasar. Sejak itulah Cina menjadi lebih terbuka terhadap Barat dan dunia internasional. Keterbukaan Cina terhadap Barat merupakan salah satu penyebab meningkatnya ekspor Cina dimana pada tahun 1996 negara tirai bambu ini masuk pada peringkat sepuluh besar negara pengekspor terbesar di dunia dan peringkat ke empat pada tahun 2003. Selain meningkatnya nilai ekspor, penanaman modal asing di Cina juga merupakan akibat dari keterbukaannya tersebut.

Sementara AS yang telah berkali-kali dilanda krisis ekonomi, berusaha keras untuk memulihkan ekonomi dalam negeri yang menuntut perhatian yang sangat besar dari pemerintah. AS dan Cina telah lama melakukan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan walaupun banyak hal-hal sensitif dari hubungan kedua negara ini. Ada banyak hal yang menjadi persoalan sensitif dari hubungan AS dan Cina, terutama mengenai masalah laut Cina selatan, pelanggaran HAM dan lain-lain, yang terkadang membuat panas pemimpin kedua negara ini.

Salah satu hal perenggang hubungan antara AS dan Cina yaitu kedua negara saling mengklaim terjadi serangan hacker dari masing-masing pihak. Sebuah perusahaan keamanan komputer asal AS, Mandiant mengatakan bahwa sebuah unit militer rahasia Cina yang berbasis di Shanghai berada dibalik serangan hacker yang menimpa sejumlah perusahaan AS. Mandiant menyebutkan, unit militer itu telah mencuri data ratusan terabyte dari berbagai industri AS. Sementara itu, Cina membantah berada dibelakang hacker, dan menyatakan AS adalah sumber serangan

hacker yang menimpa Cina.² Kejadian hacker–menghacker antara dua negara sering membuat lubang perenggang hubungan bilateral kedua negara ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, Cina ikut serta dalam permainan ekonomi di kancah global. Hal ini terbukti dari perusahaan-perusahaan dari Negeri Tirai Bambu itu mulai menunjukkan prestasinya sebagai perusahaan kelas nomer satu di pasar global. Sebagai mana yang tertulis dalam majalah The Economist yang menyajikan cerita sampul tentang Huawei asal Cina yang berhasil menggeser posisi Ericsson Swedia sebagai perusahaan pembuat perkakas telekomunikasi terbesar di dunia.

Huawei sekarang menjadi pemain global di tingkat dunia. Disusul dengan perusahaan-perusahaan Cina lainnya, seperti Haier, Lenovo yang menantang Hewlett-Packard sebagai produsen PC terbesar. Kesuksesan Huawei membuat merek besutan perusahaan swasta di Cina ini sebagai salah satu standar perjalanan panjang Cina menguasai pasar Barat.

Huawei Technologies adalah perusahaan swasta berteknologi tinggi yang mengkhususkan pada penelitian dan pengembangan (litbang), produksi dan pemasaran perangkat-perangkat telekomunikasi dan menyediakan solusi bagi operator penyelenggara telekomunikasi, seperti pelayanan Broad Band 4G, pembuatan software, hardware, aplikasi, modem, handphone, tablet, home internet, home media device, routers dan berbagai produk dan layanan lainnya. Menurut laporan

² *Cina lebih kuat dari Amerika*, 2013, the global review, http://theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=11964&type=111#. UkjzodLwngI diakses pada 28 september 2013

The Economist 3 Agustus 2012, Huawei kini telah menjelma jadi perusahaan pembuat alat-alat telekomunikasi terbesar di dunia, yang berusaha menyalip raksasa asal Swedia, Ericsson. Berhasil mencetak laba US\$3,7 miliar pada 2010, bisnis Huawei menggurita dilebih dari 140 negara dan kini melayani 45 dari 50 operator telekomunikasi terbesar di dunia.³

Ren Zhengfei membangun Huawei pada tahun 1987 dengan modal hanya 21.000 yuan atau lebih dari USD 5.000 pada saat itu. Saat itu, sebagian besar suku cadang diimpor dari Hong Kong. Baru pada tahun 1990-an, Huawei mulai bersinar di pasar Cina dengan infrastruktur telekomnya. Dengan strategi Mao Zedong, Ren Zhengfei menggarap pasar pinggiran diluar negeri, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Dari pinggiran, lalu merangsek ke jantung pasar.⁴

Kerajaan bisnis Huawei memiliki nilai bisnis sebesar USD 32 miliar dengan 140.000 karyawan dan pelanggan di 140 negara. Ia juga mengantongi 47.000 paten di perangkat teknologi. Keberhasilan Huawei diklaim karena keberaniannya memasarkan produk berkualitas dengan harga murah.

Itulah sebabnya Huawei sudah dianggap sebagai perusahaan Cina yang sudah membentuk jaringan internasional. Selain membuka banyak cabang bisnis, Huawei pun membangun 20 pusat penelitian dan pengembangan di mancanegara-termasuk di Cina, AS, Jerman, Swedia, India, Rusia, dan Turki. Untuk membiayai berbagai

³ Huawei, ZTE, dan Tuduhan Spionase Paman Sam, 2012, Viva Bola, <http://bola.viva.co.id/news/read/358320-huawei--zte--dan-tuduhan-spionase-paman-sam> diakses pada 28 september 2013

⁴ Gunakan strategi Mao, Huawei ekspansi pasar dunia, 2012, Marketeers, <http://www.themarketeers.com/archives/gunakanstrategi-mao-huawei-ekspansi-pasar-dunia.html#.UmX2FHAvXkw> diakses pada 22 Oktober 2013

fasilitas penelitian itu, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 140 ribu orang tersebut menggelontorkan US\$3,74 miliar.⁵

Keberadaan Huawei di AS menunjukkan bahwa Cina bisa menembus pasar AS, khususnya dibidang telekomunikasi. Huawei banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan domestik dan melakukan merger dan akuisisi di AS. Sejak tahun 2001, Huawei telah menjalankan bisnisnya di AS mengikuti sistem pasar bebas yang berlaku dinegeri Paman Sam ini. Banyak dari perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah yang menggunakan produk-produk telekomunikasi buatan Huawei. Huawei juga memproduksi handphone yang berteknologi tinggi yang menyaingi kecanggihan smartphone Apple buatan perusahaan AS.

Huawei mengembangkan fitur-fitur canggih yang ada dalam program handphone yang bisa memudahkan penggunaanya dalam hal komunikasi di dunia maya dengan penggunaan layanan internet. Tidak heran jika banyak warga AS yang memakai handphone buatan Huawei, bukan karena Huawei dari Cina tetapi produk buatan Huawei berkualitas dan canggih. Begitupun juga masih banyak produk buatan Huawei yang lain yang beredar luas di AS walaupun masih ada warga AS yang susah mengucapkan nama perusahaan ini.

Walaupun telah mengikuti sistem pasar bebas yang ada di AS, nampaknya pihak pemerintah AS belum bisa percaya sepenuhnya terhadap Huawei. Dari

⁵ *Huawei, ZTE, dan Tuduhan Spionase Paman Sam*, 2012, Viva Bola, <http://bola.viva.co.id/news/read/358320-huawei--zte--dan-tuduhan-spionase-paman-sam> diakses pada 28 september 2013

hubungan antara AS dan Beijing yang secara ideologi pemerintahan tidak akan pernah sama. Kedua negara selalu saling menuduh akan kejahatan dan pelanggaran yang menimpa negara masing-masing. Hal ini berimbas pada Huawei yang menjalankan bisnisnya di AS yang dinilai sebagai perusahaan pemerintah Cina yang memata-matai AS melalui jaringan internet.

AS mengatakan banyak serangan terhadap jaringan komputer AS milik pemerintah dan perusahaan swasta yang berasal dari Cina. Dalam artikel opininya di WSJ, Mike McConnell, Michael Chertoff, dan William Lynn menyatakan, Pemerintah Cina memiliki kebijakan nasional pengintaian ekonomi di dunia cyber.⁶ Ketiga mantan pejabat keamanan nasional AS itu menengarai adanya keharusan dari Beijing untuk menumbuhkan ekonominya secara tajam guna memperbaiki nasib penduduknya. "Menurut Cina, mencuri inovasi dan kekayaan intelektual lebih efisien," tulis mereka, "dari pada menghabiskan biaya dan waktu untuk menciptakan hasil pemikiran sendiri." Berbicara kepada jaringan CBS, ketua komite intelijen dari Partai Republik, Mike Rogers, menyinggung tentang Huawei. "Carilah vendor lain jika anda peduli tentang kekayaan intelektual anda, jika anda peduli tentang privasi konsumen anda, dan anda peduli tentang keamanan nasional Amerika Serikat."⁷ Michael Hayden yang juga dikenal sebagai mantan Kepala National Security Agency

⁶ The Wall Street Journal, *Barbarisme Digital Cina*, 2013, The Wall Street Journal, <http://indo.wsj.com/posts/2013/02/04/barbarisme-digital-cina/> diakses pada 30 Oktober 2013

⁷ Tempo.Co, *Perusahaan Huawei dan ZTE Dinilai Bahayakan Amerika*, 2012, Tempo.Co, <http://pangan.atjehpost.com/read/2012/10/09/23565/0/51/Perusahaan-Huawei-dan-ZTE-Dinilai-Bahayakan-Amerika> diakses pada 22 Oktober 2013

(NSA) menuduh, "Huawei telah berbagi informasi dengan Pemerintah Cina mengenai pengetahuan sistem telekomunikasi asing".⁸

Dengan tuduhan spionase, hubungan dengan pemerintah Cina dan tuduhan lainnya, pihak Huawei tetap pada pendiriannya yaitu menolak semua tuduhan yang ada karena selama penyelidikan Huawei memberikan laporan, bukti dan data tentang perusahaan. Petinggi Huawei yang bemarkas di Shenzhen, Cina, membantah adanya hubungan antara perusahaannya dengan intelijen Cina. Mereka juga menegaskan bahwa perusahaan tersebut tidak dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok. Keduanya juga membuka kesempatan bagi AS mengirim tim audit guna membuktikan bantahan mereka. "Tuduhan ini tidak berdasar dan mengabaikan realita teknis dan dagang. Tuduhan ini juga mengancam lapangan pekerjaan dan inovasi di Amerika," kata juru bicara Huawei, William Plummer.⁹

Sebaliknya pihak Huawei menyatakan Amerika Serikat (AS) harus bersaing secara sehat, terkait larangan perusahaan itu berbisnis di Negeri Paman Sam dengan alasan keamanan nasional. "Saya meminta Pemerintah AS harus bersaing secara sehat," kata juru bicara Huawei Technologies Scott Sykes dalam jumpa pers dengan wartawan sejumlah negara Asia di Shanghai.¹⁰

⁸ *Mantan Bos CIA Tuduh Huawei Mata-Mata China*, 2013, Okezone, <http://international.okezone.com/read/2013/07/19/413/839670/mantan-bos-cia-tuduh-huawei-mata-mata-china> diakses pada 11 Maret 2014

⁹ *AS Tuduh Huawei dan ZTE Alat Mata-mata China*, 2012, Viva News <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/357663-as-tuduh-huawei-dan-zte-alat-mata-mata-china> diakses pada 28 September 2013

¹⁰ *Huawei: AS harus bersaing secara sehat*, 2012, Antara News, <http://www.antaranews.com/berita/341938/huawei-as-harus-bersaing-secara-sehat> diakses pada 22 Oktober 2013

Scott Sykes mengatakan pihaknya sangat menghormati langkah dan kebijakan Pemerintah AS untuk melindungi keamanan nasionalnya. "Sangat tidak mungkin bagi kami melakukan kegiatan mata-mata seperti yang dituduhkan. Apalagi sebagian besar peralatan, komponen yang digunakan Huawei berasal dari mancanegara, termasuk AS. Bagaimana Huawei akan melakukan hal yang dituduhkan."

B. Rumusan Masalah

Dari penulisan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menemukan sebuah pokok permasalahan yaitu:

Mengapa pemerintah AS berusaha menghalangi bisnis Huawei di AS?

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka pemikiran merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa feomena itu terjadi.¹¹

Berangkat dari uraian diatas, kerangka dasar teoritik yang akan penulis pergunakan dalam permasalahan ini adalah teori realisme.

Teori Realisme

Para realis memandang negara sebagai unitary dan rasional. Realis menganggap bahwa negara merupakan kesatuan dan selalu bertindak secara rasional

¹¹ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 219

serta prudence atau berhati-hati dalam bertindak. Aspek terpentingnya merupakan bagaimana suatu negara yang dianggap sebagai aktor paling penting bagi para realis, mempertahankan keberadaannya (survive). Karena, negara akan melakukan apa saja dan akan mempertahankan mati-matian demi mendapatkan rasa aman bagi negara itu sendiri. Disamping itu, negara juga tidak memikirkan keadaan negara lain dan hanya mementingkan negaranya sendiri, inilah kondisi yang dinamakan struggle of power.

Seperti yang dikatakan bahwa negara merupakan aktor terpenting dan kekuasaan tertinggi hanya dikuasai oleh negara, maka kondisi tersebut merupakan berlakunya suatu sistem anarki. Selain itu, keberadaan prinsip moral universal tidak dianggap sebagai variabel signifikan didalam sistem politik internasional.

Menurut Morgenthau ada enam prinsip realisme:¹²

1. Realisme politik menganggap bahwa politik, seperti masyarakat umumnya, dikendalikan oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia.
2. Politik internasional merupakan wadah suatu negara dalam memenuhi interest-nya sebagai tujuan mendapatkan power.
3. Bentuk dan sifat kekuasaan negara akan bermacam-macam (kontekstual) tetapi kepentingan nasional akan tetap sama.
4. Prinsip moral universal tidak menuntut sikap negara.
5. Tidak ada prinsip moral universal.
6. Secara intelektual politik itu otonom.

¹² Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hal. 5

Tindakan yang diambil suatu negara didasarkan atas kepentingannya bukan berdasarkan prinsip moral. Konsep bahwa politik itu otonom. Menurut Morgenthau, politik sebagai lingkungan tindakan dan pengertian yang berdiri sendiri atau terpisah dari lingkungan lainnya seperti ilmu ekonomi (dipahami dalam arti kepentingan yang didefinisikan sebagai kekayaan, etika, estetika, atau agama).

Hubungan internasional merupakan upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan power yang dimiliki. Morgenthau mengasumsikan negara seperti manusia, yang haus akan power dan berusaha memenuhi interestnya, yang didefinisikan sebagai power juga. Jadi, beberapa poin penting yang bisa diambil dari realisme adalah, bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional yang selalu berusaha mempertahankan dan memperoleh power. Isu utama dalam realisme adalah keamanan nasional dan mempertahankan eksistensi. Problem sentral dari hubungan internasional adalah kondisi anarki, dimana tidak ada kekuatan supranasional. Tidak seperti liberalis, realis tidak percaya adanya koordinasi, segala sesuatu diselesaikan dengan perang

Statisme sama halnya dengan state centric, maka letak statisme digambarkan berada diatas segitiga karena dianggap sebagai aktor utama. Kemudian survive seperti yang telah dijelaskan, negara akan membela mati-matian demi mendapatkan keamanan negaranya agar tetap bertahan. Oleh karena keamanan merupakan sebuah isu utama bagi suatu negara, maka hal tersebut digunakan sebagai 'alat' dalam meningkatkan power negara (power gaining). Power itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tangible power dan intangible power. Tangible power digambarkan sebagai

kekuatan fisik seperti halnya negara dengan SDA yang berlimpah, lokasi negara yang strategis, kaya akan sumber minyak dan gas, dll. Selain itu yang dimaksud dengan intangible power adalah kekuatan diluar fisik atau kasat mata seperti kekuatan diplomasi negara, kualitas pemerintahan suatu negara yang kuat, dan lain-lain. Namun, besarnya power yang dimiliki belum tentu dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara yang kuat. Sebaliknya, bila terdapat semisal negara A mampu mempengaruhi negara B untuk memenuhi suatu kepentingan negara A maka negara A dapat dikatakan sebagai negara yang kuat.

AS adalah negara yang menganut prinsip realisme, hal ini bisa dilihat dari percaturan politik yang dimainkan AS terhadap negara-negara lain. AS akan berusaha mati-matian untuk mencapai kepentingan nasionalnya. AS adalah negara kuat baik dari segi pemerintahan, ekonomi, politik, bahkan masyarakatnya. Dengan power yang dimiliki AS akan mengamankan kepentingan dan bahkan bisa mempengaruhi negara lain.

Kepercayaan terhadap sistem internasional yang anarki, AS merasa terancam dan pengaruhnya tersaingi dalam urusan domestik dan internasional dengan perkembangan Huawei. Pemerintah AS merasa keamanan ekonomi domestik atau nasional AS terancam dengan keberadaan Huawei dan produk-produknya yang dipasarkan di AS dan di negara lain. Hal ini menjadikan AS untuk membuka mata bahwa musuh yang mengancam kekuasaannya ada didepan mata. Berbagai cara akan dilakukan AS untuk mempertahankan kepentingannya.

Untuk memajukan bisnisnya, Huawei terus berusaha membangun penyalur penjualan produknya di AS yang dimaksudkan untuk berkompetisi melawan vendor domestik, seperti Cisco Systems Inc. dan Juniper Networks. Salah distributor produk Huawei di AS yaitu Synnex.¹³ Selain memberikan pelayanan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Huawei juga bersain dengan perusahaan domestik AS dalam membuat smartphone, device, perlengkapan 3G, base stations, modems, tablet Android, teknologi WiMAX, teknologi SingleRAN, wireless equipment, teknologi LTE, router, microwave, dan untuk pembuatan teknologi cloud computing dan enterprise space, Huawei akan berkompetisi dengan Oracle, Avaya, Hewlett-Packard, Cisco, dan Amazon. Sebagai penganut paham realis AS memandang Huawei yang telah berkembang pesat akan menjadi mesin ekonomi baik secara domestik maupun internasional bagi Cina. Oleh karena itu, AS berusaha mencari celah untuk membuat bisnis Huawei tidak menjadi ancaman bagi AS.

Politik Luar Negeri

Pengertian dasar tentang politik luar negeri yaitu merupakan *action theory* atau kebijakan suatu negara yang ditujukan kenegara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri adalah suatu formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik konteks dalam negeri dan

¹³ *Huawei Withdraws from U.S. Market, Sort-Of*, 2013, Channel Nomics, <http://channelnomics.com/2013/12/03/huawei-withdraws-u-s-market-sort/> diakses pada 9 Januari 2014

luar negeri sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara dalam menanggapi isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Menurut K.J Holsti, politik luar negeri adalah tentang bagaimana suatu negara memiliki atau membuat kebijakan, sikap, atau juga aksi untuk menyelesaikan suatu masalah atau mempromosikan perubahan situasi dilingkungan yang berada diluar batas wilayah negara tersebut. Selain itu K.J Holsti juga menjelaskan bahwa politik luar negeri terdiri dari empat komponen, seperti orientasi politik luar negeri, peranan nasional, tujuan-tujuan, dan implementasi atau aksi.¹⁴

Keikutsertaan suatu negara dalam isu-isu internasional merupakan ekspresi orientasi umum negara tersebut. Orientasi ini merupakan sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan luar dan ditujukan sebagai strategi untuk meraih tujuan domestik maupun eksternal. Strategi dan orientasi ini dihasilkan oleh sejumlah keputusan sebagai usaha untuk mengubah nilai (*values*) dan kepentingan, hingga upaya untuk mengubah kondisi atau karakter yang ada di lingkungan domestik serta lingkungan eksternal.

Komponen politik luar negeri selanjutnya adalah peran nasional. Peran nasional menggambarkan secara garis besar fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan negara dalam berbagai konteks internasional atau garis pedoman untuk bertindak jika terjadi situasi khusus dan yang ingin dicapai pemerintah secara regional atau internasional sebagai suatu keseluruhan.¹⁵

¹⁴ K.J Holsti. Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, Jakarta, Erlangga, 1988, hal 108

¹⁵ Ibid. hal 134

Selain peran nasional, tujuan juga merupakan komponen dari politik luar negeri. Tujuan yang ada pada dasarnya adalah suatu gambaran keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi dimasa depan yang ingin diwujudkan pemerintah melalui pembuat kebijakan luar negeri dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain.¹⁶ Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat kongkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk mengklarifikasikan tujuan politik luar negeri yang diambil suatu negara, K.J Holsti membangingnya:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short trem*), jangka menengah (*middle term*), dan jangka panjang (*long term*)
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara pada negara lain.¹⁷

Sedangkan komponen yang terakhir adalah implementasi atau aksi. Jika sebelumnya pada orientasi, peran dan terdiri dari pandangan, sikap terhadap dunia luar, keputusan dan aspirasi pembuat kebijakan tetapi dalam kebijakan juga mengandung komponen implementasi atau aksi, yakni hal yang dilakukan pemerintah terhadap pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan sesuatu atau dapat dikatakan implementasi adalah suatu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung

¹⁶ Ibid. hal 137

¹⁷ Ibid. hal 158

perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah yang bersangkutan.¹⁸

K.J Hoslsti menjelaskan, "Strategi politik luar negeri adalah output. Sedangkan input berasal dari kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan intern yang dikonversi menjadi input, melalui proses pemahaman situasi yang dikaitkan dengan penentuan tujuan yang akan dicapai, mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya-upaya nyata dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan."

Dalam pelaksanaan tentang politik luar negeri terdapat tiga determinan yang harus di perhatikan. Pertama adalah kepentingan nasional, dimana politik luar negeri adalah pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara terhadap lingkungan luarnya. Politik luar negeri sebagai pencerminan dari kepentingan nasional dikemukakan oleh J. Frankel, "Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri."¹⁹

Yang perlu diperhatikan dalam keterkaitan kepentingan nasional dan politik luar negeri adalah bahwa pelaksanaan politik luar negeri tersebut semaksimal mungkin dapat menguntungkan bagi kepentingan nasional, baik di ukur dari kepentingan keselamatan dan keamanan nasional, maupun diukur dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan nasional.

¹⁸ Bruce Russett dan Harvey Starr, *World Politics: The menu for Choice*. 2nd ed, New York: W.H Freeman and Co, 1988, hal 190-193

¹⁹J. Frankel, *Hubungan Internasional*, ANS Sungguh Barsaudara, Jakarta, 1990, hal 55

Determinan kedua yang berhubungan dengan politik luar negeri adalah kemampuan nasional. Kemampuan nasional adalah kemampuan yang dimiliki suatu bangsa, baik secara aktual maupun bersifat potensial. Dengan kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest maupun latent yang meliputi segala sumber daya yang melekat pada bangsa yang bersangkutan.

Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Setiap negara merumuskan kebijakan politik luar negeri, tetapi tidak akan mungkin mengatur dan menetapkan proses dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antara bangsa-bangsa di dunia.

Dari ketiga determinan yang dijelaskan diatas, maka penulis akan menitik beratkan pada deteminan pertama yaitu kepentingan nasional. Menurut Morgentahu kepentingan nasional adalah penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestaraan negara-bangsa.²⁰ Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.²¹

Salah satu dari kepentingan nasional suatu negara adalah kepentingan ekonomi. Kemampuan ekonomi termaksud dari sumber kekuasaan yang dimiliki suatu negara. Daya paksa sebagai salah satu dari faktor yang membentuk kekuasaan yaitu

²⁰ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal 18

²¹ Ibid. hal 140

meliputi kemampuan ekonomi, kesatuan politik, efektifitas sistem politik, kecakapan kepemimpinan, dan reputasi.²²

Jika dilihat dari Teori Kepentingan Nasional (National Interest) Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya.²³

Negara yang memiliki kemampuan ekonomi akan menjadi negara kuat baik didalam negeri maupun terhadap hubungan luarnya. Negara yang memiliki kemampuan ekonomi seperti AS menjadikannya negara yang disegani didunia, karena ia bisa mempengaruhi negara lain disegala sektor dengan cara memberikan bantuan pada negara yang membutuhkan dan pastinya tidak gratis, ada timbal balik yang memberikan keuntungan pada AS. Dengan keadaan seperti ini AS ingin tetap mempertahankan pengaruhnya pada negara lain. Penguasaan AS pada sistem okonomi internasional menunjukkan kemampuan AS untuk menguasai sistem ekonomi internasional yang terus menghasilkan pundi-pundi keuntungan AS. Dengan status sebagai penguasa ekonomi dunia AS akan mempertahankan status tersebut

²² Ibid. hal 117

²³ D. S., Papp, "Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions. New York: MacMillan Publishing Company, 1988. hal 29

dengan cara apapun dan tidak akan memberi kesempatan pada negara lain terutama negara-negara yang berlawanan dengan AS seperti Cina.

Ketika AS berada dipuncak kekuasaannya di tahun 1940-an, *Economist* dari London menghubungkan kekuatan industri dengan kekuatan ekonomi AS dengan mengatakan:

Dalam setiap perbandingan sumber daya potensial dari negara-negara besar, Amerika Serikat, bahkan sebelum perang Hitler, jauh melebihi tiap negara lain di dunia dalam kekuatan material, dalam skala industrialisasi, dalam bobot sumber daya, dalam tingkat hidup, dengan setiap indeks hasil produksi dan konsumsi. Dan perang yang kecuali melipatgandakan pendapatan nasional di Amerika, sementara merusak atau sangat melemahkan setiap negara besar yang lain, telah banyak sekali menambah pengaruh sehingga kini menjulang tinggi, jauh melebihi rekan-rekannya. Seperti tikus dalam kandang gajah, mereka dengan rasa prihatin mengikuti langkah sang raksasa. Harapan apa sekiranya untuk mereka, kalau raksasa itu menyebarkan pengaruhnya kemana-mana, mereka senantiasa berada dalam bahaya, sekalipun sang gajah diputuskan agar berpangku tangan saja?²⁴

Terhadap kaitannya dengan Huawei, rumusan kebijakan politik luar negeri AS merupakan hasil dari proses politik dalam menyikapi Huawei yang dinilai mengancam kepentingan nasional AS. Hasil dari rumusan itulah menjadi dasar dari segala tindakan AS terhadap Huawei.

Amerika Serikat sendiri dalam pelaksanaan politik luar negeri tentunya juga berorientasi pada kepentingan nasional yang di dasarkan pada kondisi obyektif baik di dalam negeri maupun kondisi politik internasional yang berkembang saat ini. Bila ditinjau dari segi filsafat politik, politik luar negeri AS tampak unik dalam menggabungkan kepraktisan yang selalu hati-hati dengan idealisme yang utopis. Di satu sisi politik luar negeri Amerika Serikat dapat berperan untuk melindungi negara

²⁴ *Economist*, 24 Mei 1947, hlm785, dalam Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hal. 147

lain dengan cara memperluas kepentingan AS di seluruh dunia, disisi lain AS mempunyai tugas mengubah system internasional sedapat mungkin seperti keinginannya yang didasarkan atas kemauan dan citranya sendiri dan AS menginginkan kedua cara itu dalam politik luar negerinya. Sifat yang dapat dikatakan tidak taat azas itu menyebabkan politik luar negeri AS menunjukkan ciri khas yang bertentangan.

Begitupun juga dalam pergaulan internasional, AS memainkan peran yang sangat penting. Dengan power yang dimiliki AS berusaha menancapkan pengaruh pada negara lain. Hal ini bisa dilihat dari penguasaan sistem ekonomi internasional oleh AS. Pembuatan aturan-aturan ekonomi internasional yang diprakarsai oleh AS sebenarnya adalah keinginan AS untuk menguasai perekonomian internasional. Bahkan jika menganalisa perkembangan sistem perekonomian dunia saat ini, rezim yang tengah berkuasa merupakan antek - antek kapitalis - neolib dimana AS menjadi negara pelopor dan pendukung utamanya. Sebut saja terkait kemunculan World Bank, International Monetary Fund, dan World Trade Organization.

Melalui kekuasaannya, dengan modal besar yang berasal dari perusahaan-perusahaan (seperti TNCs, MNCs) miliknya, AS mampu menjadi aktor yang berpengaruh, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan dalam tiga institusi ekonomi internasional di atas.

Campur tangan pemerintah AS terhadap Huawei adalah bentuk AS ingin mengamankan kepentingan nasional berupa kepentingan ekonomi domestik serta

ekonomi internasional dengan segala cara untuk mencegah penetrasi Huawei yang berbisnis di AS. Dengan mengeluarkan isu negatif atau tuduhan spionase pada Huawei dan tuduhan lainnya, maka citra Huawei akan akan jatuh yang berimbas pada kepercayaan konsumen akan berkurang bahkan tidak percaya lagi pada Huawei dan produknya tidak hanya di negara Paman Sam tetapi juga di negara-negara lain. Didorong oleh motif keamanan ekonomi yang juga merupakan bentuk kepentingan nasional maka dengan segala power yang ada akan digunakan AS untuk menjaga kepentingan nasionalnya.

Keputusan kongres AS untuk melarang Huawei beserta produknya di AS adalah keputusan yang untuk mengamankan kepentingan nasional berupa keamanan ekonomi domestik dan internasional dari penetrasi Huawei. Tindakan ini harus diambil oleh pengambil kebijakan AS jika tidak maka tentunya keamanan ekonomi domestik dan pengaruh terhadap ekonomi internasional AS akan terganggu yang nantinya akan berdampak pada kerugian besar pada sektor-sektor vital negara seperti industri, perdagangan, militer bahkan sosial yang mana semuanya adalah kepentingan nasional. Akan banyak lagi kerugian jika pesaing utama AS yaitu Cina memanfaatkan Huawei untuk menyaingi AS.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka dasar teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan hipotesa yaitu: Pemerintah AS

berusaha untuk menghalangi bisnis Huawei di AS karena ingin mengamankan kepentingan ekonomi dan pasar domestiknya.

E. Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pemerintah AS menghalangi bisnis Huawei di AS. Keberhasilan Huawei menembus pasar telekomunikasi AS dan menjadi vendor dengan produk canggih bisa menyaingi perusahaan telekomunikasi yang ada di AS. Hal ini berimbas pada kekhawatiran pemerintah AS terhadap kepentingan ekonomi dan pasar domestik AS. Pihak pemerintah AS mengeluarkan pernyataan bahwa Huawei yang beroperasi dinegeri Paman Sam telah melakukan kegiatan spionase terhadap AS sebagai cara menahan laju penetrasi Huawei.

F. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian dan penulisan tidak meluas dan membuat pemaknaan akhir menjadi tidak jelas, maka penulis membatasi jangkauan penelitian dan penulisan Alasan AS Menghalangi Bisnis Huawei di AS sejak keputusan kongres AS tahun 2012. Penulis akan menyinggung data-data dan fakta-fakta diluar dari jangkauan penelitian penulis jika diperlukan, untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, dengan catatan diperhatikan relevansinya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu cara utama dalam melakukan penelitian guna mencapai tujuan penelitian yaitu untuk memberikan paparan

menyeluruh tentang alasan AS menghalangi bisnis Huawei di AS. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan data-data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan, yaitu melalui: buku-buku, jurnal dan berita-berita dari media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji yang sifatnya relevan.

Selain itu, penulis juga dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara komparasi, yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi lima

BAB I: merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: menjelaskan tentang hubungan bilateral AS dan Cina, ditinjau dari dinamika hubungan AS dan Cina serta tantangan hubungan AS dan Cina

BAB III: menjelaskan tentang perusahaan Huawei ditinjau dari sejarah berdirinya Huawei dan kerjasama Huawei dengan AS

BAB IV: menjelaskan tentang alasan AS menghalangi bisnis huawei di AS

BAB V: merupakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini